

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun yang semakin tinggi menyebabkan berbagai permasalahan yang sulit teratasi. Permasalahan dalam bidang ekonomi salah satunya yaitu sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Faktanya di lapangan jumlah tenaga kerja berbanding terbalik dengan jumlah lapangan pekerjaan di sektor formal. Dengan banyaknya persyaratan serta rumitnya bekerja di sektor formal, membuat masyarakat memilih untuk bekerja ke sektor informal yang salah satunya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Menurut hasil sensus ekonomi tahun 2016 mendata jumlah usaha non pertanian di Indonesia mencapai 26,7 juta usaha. Jumlah ini meningkat 17,6 persen dibandingkan jumlah usaha saat sensus ekonomi 2006 yang tercatat sebanyak 22,7 juta usaha. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, dari total jenis usaha tersebut sekitar 70,8 persennya merupakan kategori usaha tidak menempati bangunan. Jenis usaha tersebut misalnya pedagang kaki lima, usaha kaki lima, usaha dalam rumah tempat tinggal dan sebagainya. Menurut Dwiyanti (dalam Jamaluddin, 2015: 287) Pedagang Kaki Lima atau yang sering dikenal dengan sebutan PKL merupakan pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang. Dengan demikian Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha yang bergerak di sektor informal yang biasanya

memanfaatkan fasilitas umum, menggunakan prasarana kota, baik yang bersifat sementara maupun menetap.

Keberadaan PKL merupakan salah satu gagalnya program pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Kondisi tersebut semakin bertambah sulit dengan kurang meratanya pembangunan pemerintah di desa-desa menjadikan wilayah perkotaan sebagai daerah tujuan para PKL. Contohnya saja di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Depok dan lain-lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh para pelaku usaha PKL menempatkan mereka pada kondisi-kondisi yang dianggap tidak layak atau bahkan mengganggu aktivitas sosial. Membahas mengenai PKL tentunya tidak lepas dari berbagai persoalan klasik yang terus menerus terjadi hingga saat ini. Di kota-kota besar misalnya saja, banyak sekali konflik yang terjadi antara para PKL dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat sekitar mereka berada.

Keberadaan PKL sering kali menjadi persoalan baik bagi pemerintah maupun bagi sebagian kecil masyarakat. Di satu sisi, kehadiran mereka (PKL) dapat membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Di sisi lain, kehadiran PKL dianggap menjadi salah satu penyebab terganggunya estetika tata letak sebuah perkotaan. Hampir di seluruh daerah di Indonesia, tentunya memiliki persoalan yang hampir sama yaitu hadirnya PKL yang tidak tertata dengan rapi, terkesan kumuh serta sulit untuk di atur seringkali dianggap mengganggu oleh sebagian masyarakat serta pemerintah.

Begitu juga dengan PKL yang ada di Kota Pangkalpinang, yang secara kasat mata memiliki persamaan dengan PKL yang ada di daerah lainnya. Namun PKL di Kota Pangkalpinang, atau lebih tepatnya di Alun-alun Taman Merdeka memiliki keunikan tersendiri dari PKL-PKL pada umumnya. Menurut Rijaya (2016: 29) berdasarkan aspek legalitas, PKL resmi adalah PKL yang diakui keberadaannya dan tergabung dalam organisasi atau binaan oleh Pemerintah Kota. PKL resmi menempati ruang dagang yang telah diizinkan oleh pemerintah atau mendapat perijinan formal dari Pemerintah Kota salah satunya adalah PKL yang ada di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang.

Kehadiran PKL di Taman Merdeka Kota Pangkalpinang kian hari bertambah banyak. Bisa dilihat dari keberagaman jenis barang dagangan mereka seperti jenis olahan makanan, pakaian, jasa dan lain sebagainya. Begitu juga dengan keberagaman asal daerah PKL yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Asal daerah PKL tersebut yaitu Bandung, Madura, Solo, Padang, Jakarta, Palembang, dan lain sebagainya. Keberagaman asal usul PKL ini bukanlah tanpa sebab. Hal ini dikarenakan Pangkalpinang merupakan pusat perekonomian terbesar di Bangka Belitung.

Ketika berbicara mengenai persoalan asal usul PKL, sebenarnya hal ini sudah berkaitan dengan persoalan identitas. Identitas secara sederhana dapat diartikan sebagai ciri khas atau wujud jati diri yang tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Identitas adalah suatu ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada diri seorang individu yang menjadi ciri khasnya. Identitas sosial individu adalah akumulasi dari nilai-nilai kelompok yang diinternasionalikan ke dalam konsep diri

individu (Abrams dalam Afif, 2015: 13). Internalisasi nilai-nilai kelompok ke dalam konsep diri individu merupakan sumber kendali dan rasa aman lebih-lebih ketika dia berhadapan dengan individu-individu dari kelompok lain.

Identitas asal PKL misalnya saja berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa, PKL di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang cenderung mendominasi satu sama lain. Realitas di lapangan bahwa PKL asal Palembang lebih mendominasi jika dibandingkan dengan PKL asal daerah lainnya. Hal itu ditandai dengan banyaknya jumlah PKL asal Palembang yang berjualan. Salah satunya dapat dilihat dari jenis barang dagangan yang hendak dijual. Contohnya saja makanan khas daerah seperti “Pempek Palembang” yang dijajakan oleh pedagang. Tidak hanya itu, banyak sekali makanan, minuman, serta jasa-jasa yang ditawarkan oleh pedagang asal Palembang tersebut.

Penelitian ini juga tidak hanya mengkaji persoalan kontestasi atau perebutan ekonomi yang terjadi antar sesama PKL itu sendiri, akan tetapi juga akan membahas dampak atau implikasi hadirnya PKL di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang terhadap area lahan parkir. Penelitian ini juga tidak hanya membahas etnis yang mendominasi saja, akan tetapi mengkaji seluruh etnis yang berjualan di Alun-alun. Keberagaman etnis PKL serta implikasi hadirnya PKL terhadap lahan parkir tersebut kemudian menjadi menarik bagi peneliti untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk kontestasi ekonomi yang terjadi antar berbagai etnis di ruang yang sama, serta faktor apa saja yang melatarbelakangi

pengelompokan sosial yang terjadi antara PKL di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kontestasi ekonomi berbasis identitas kelompok oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pengelompokan sosial pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk kontestasi ekonomi berbasis identitas kelompok oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi pengelompokan sosial Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan disiplin ilmu sosiologi terkait dengan sosiologi ekonomi. Khususnya yang berkaitan dengan persoalan persaingan ekonomi antar sesama Pedagang dan pengelompokan sosial Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ketertarikan terkait kontestasi ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) berbasis identitas kelompok.
- b. Serta memberikan informasi bagi khalayak luas terkait adanya upaya saling mendominasi antar Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang berkenaan dengan penyaluran ruang khusus bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang.

## E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini akan peneliti cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rijaya (2016) yang berjudul “*Kontestasi Ruang Ekonomi VS Ruang Publik (Studi Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Bangka Trade Center dan Ramayana Kota Pangkalpinang)*”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa, kontestasi yang terjadi antara PKL dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Di satu sisi PKL menjadikan kawasan tersebut sebagai lahan untuk berjualan, namun disisi lain Pemerintah berkepentingan untuk menata wilayah guna kepentingan publik.

Bentuk kontestasi antara PKL dengan Pemerintah Kota diantaranya yaitu *pertama*, eksistensi PKL terhadap upaya Pemkot dalam mendirikan pasar pembangunan. *Kedua*, resistensi PKL terhadap renovasi tanpa solusi. Pemerintah merelokasi para PKL ke tempat yang dianggap oleh mereka tidak strategis, sehingga kondisi tersebut membuat para PKL tetap kembali berjualan di tempat lamanya. *Ketiga*, resistensi PKL terhadap aparat Pol PP. *Keempat*, PKL menjadi UMKM sebagai katub penyelamat dari upaya penertiban oleh pemerintah.

Penelitian serupa oleh Ade Fradestha (2010) dalam skripsinya yang berjudul “*Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Relokasi Pasar Pembangunan Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang*”. Penelitian ini mengupas alasan-alasan PKL di pasar pembangunan melakukan resistensi terhadap program

relokasi Pemerintah Kota Pangkalpinang serta mengidentifikasi pola-pola interaksi sosial dan ekonomi dari aktor yang mendorong PKL melakukan resistensi. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya resistensi PKL disebabkan oleh berbagai faktor yaitu, faktor kebijakan dan faktor migrasi. *Faktor kebijakan* yaitu adanya program pembangunan Pasar Pembangunan menjadi BTC serta pembangunang kawasan sekitar, yang sekaligus adanya perpindahan tempat para PKL ke tempat relokasi yang ditentukan oleh Pemkot Pangkalpinang.

Kebijakan tersebut menimbulkan resistensi oleh PKL yang menganggap tempat relokasi kurang memadai dan biaya sewa yang cukup mahal. Adanya kebijakan penertiban melalui aparat keamanan oleh pihak Pemkot. *Faktor migrasi* yaitu migrasi PKL dari luar Pangkalpinang sehingga terjadi peledakan jumlah PKL. Serta terdapat beberapa faktor yang juga ikut mendukung terjadinya resistensi yang dilakukan PKL terhadap relokasi, serta ketidakteraturan di pasar pembangunan yaitu pola interaksi ekonomi dan sosial dan adanya peran aktor sebagai penyebab munculnya ketidakteraturan pasar.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Faridz Effendi (2014) yang berjudul “*Dampak Penerapan Kebijakan Perelokasian Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat*”. Penelitian ini mengupas tentang dampak pasca relokasi PKL di Parittiga. Berbagai permasalahan serta dampak yang muncul dari upaya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun dampak pasca relokasi tersebut yaitu. *Pertama*, PKL mengalami kerugian akibat tempat relokasi yang kurang tepat dan tidak memadai. *Kedua*, memburuknya pola hubungan antara PKL dengan pemerintah. *Ketiga*, konflik antar sesama PKL yaitu



hubungan antar PKL mulai merenggang akibat kecemburuan mengenai lokasi relokasi yang baru. *Keempat*, masyarakat kesulitan mengakses PKL, mengingat lokasi relokasi yang cukup jauh.

Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun dari segi perbedaannya dengan penelitian yang peneliti kaji adalah pertama penelitian yang dilakukan oleh Rijaya (2016), penelitian ini mengkaji permasalahan kontestasi yang terjadi antara pemerintah dengan PKL yang memiliki perbedaan kepentingan. Penelitian kedua, Ade Fradestha (2010) penelitian ini mengkaji tentang alasan-alasan PKL melakukan resistensi terhadap program relokasi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Artinya bahwa, PKL melakukan upaya perlawanan terhadap program Pemerintah.

Penelitian ketiga, yaitu oleh Faridz Effendi (2014) penelitian ini mengkaji terkait dampak penerapan kebijakan atau relokasi PKL di Parittiga. Artinya bahwa penelitian tersebut membahas dampak setelah adanya relokasi bagi aktivitas PKL. Sementara dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada kontestasi ekonomi berbasis identitas kelompok. Realitasnya dilapangan bahwa PKL saling mengelompok serta adanya upaya saling mendominasi antar sesama PKL.

## **F. Kerangka Teoretis**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satu teori kelompok yang berorientasi sosiologi yaitu teori identitas sosial. Teori ini merupakan sebuah analisis psikologi sosial mengenai proses pembentukan konsep

diri dalam konteks keanggotaan di dalam kelompok, proses-proses yang berlangsung dalam kelompok, dan hubungan-hubungan yang terjadi antar-kelompok. Pendekatan ini secara eksplisit dibentuk oleh keyakinan bahwa perilaku kolektif tidak dapat dipahami dan dijelaskan semata-mata dengan merujuk pada proses-proses yang terjadi di level individu atau interaksi antarindividu. Melainkan lebih ditentukan oleh seperangkat nilai, aturan, atribut, atau pola perilaku yang berkembang serta terbagikan secara kolektif dalam sebuah kelompok. Dalam perspektif teori ini, perilaku individu tidak lagi ditentukan oleh pilihan bebasnya sebagai agen yang berdiri sendiri. Akan tetapi muncul dari identifikasi diri sebagai bagian dari kelompok yang menaunginya (Afif, 2015: 2).

Teori identitas sosial yang dipelopori oleh Tajfel (dalam Sarwono, 2005: 90-91) merupakan upaya untuk menjelaskan prasangka, diskriminasi, konflik antar kelompok, dan perubahan sosial. Ciri khas Tajfel adalah non-reduksionis, yaitu membedakan antara proses kelompok dari proses dalam diri individu. Jadi harus dibedakan antara proses intra individual yang membedakan seseorang dengan orang lain dan proses identitas sosial yang menentukan apakah seseorang dengan ciri-ciri tertentu termasuk atau tidak dalam suatu kelompok tertentu (Sarwono, 2005: 90).

Menurut Tajfel (dalam Afif, 2012: 17-18) area kajian teori identitas sosial adalah pembahasan tentang perilaku-perilaku individu dalam konteks hubungan antarkelompok yang mencerminkan keberadaan unit-unit sosial lebih besar di mana individu bernaung di dalamnya, seperti organisasi-organisasi sosial, sistem-sistem kebudayaan, dan sistem-sistem sosial lainnya yang mana individu yang

mana individu cenderung akan menempatkan hal-hal tersebut sebagai rujukan bagi perilaku-perilaku sosialnya.

Identitas sosial menurut Hogg dan Abram (dalam Afif, 2012: 18) terbentuk dari keterlibatan, rasa peduli, dan rasa bangga individu sebagai bagian dari kelompok sosial yang dinaunginya. Ia merupakan bagian dari konsep diri individu yang bersumber dari pengetahuan tentang keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial yang menganut nilai, norma, dan ikatan emosional tertentu yang mampu menyatukan anggota-anggotanya. Dengan demikian, Identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada dalam sebuah kelompok sosial tertentu melalui mana individu tersebut dengan sengaja menginternalisasi nilai-nilai, turut berpartisipasi, serta mengembangkan rasa peduli dan bangga terhadap kelompoknya.

Menurut Operario dan Fiske (dalam Afif, 2012: 18) Teori identitas sosial memiliki tiga asumsi utama yaitu : pertama, setiap individu akan berusaha mempertahankan konsep dirinya yang positif. Kedua, konsep diri tersebut lahir dari identifikasi terhadap kelompok sosial yang lebih besar. Ketiga, upaya individu dalam mempertahankan konsep dirinya yang positif itu cenderung dilakukan melalui cara membanding-bandingkan kelompoknya dengan kelompok lain. Perilaku kelompok berbeda dengan perilaku individu, perilaku kelompok antara lain *ethnosentrisme*, *ingroup bias*, kompetisi dan diskriminasi antar kelompok, stereotip, prasangka, uniformitas, konformitas, dan keterpaduan kelompok. Menurut Tajfel proses yang mendasari perilaku kelompok adalah

kategorisasi dan perbandingan sosial. Kategorisasi dan perbandingan sosial ini akan meningkatkan persepsi ingroup (Sarwono, 2005: 91).

Sebuah kelompok sosial adalah seperangkat individu yang memegang identifikasi sosial umum atau melihat diri mereka sebagai anggota kategori sosial yang sama. Kemudian melalui proses perbandingan sosial, orang-orang yang memiliki kesamaan diri tertentu dalam kelompok dikategorikan dengan diri yang sama dan diberi label dalam kelompok, sedangkan orang-orang yang berbeda yang tidak memiliki kesamaan dalam kelompok dikategorisasikan sebagai kelompok luar. Identitas sosial dapat menggunakan berbagai kriteria kategorisasi, yang paling sering adalah ras, etnik, dan warna kulit. Akan tetapi dapat juga kelas sosial-ekonomi, kasta dan agama (Sarwono, 2005: 92).

Teori identitas sosial menekankan pada tahap pembentukan identitas sosial yang dimiliki kelompok tertentu dan individu yang menjadi anggota kelompok tersebut akibat dari kategorisasi dan pembedaan oleh masyarakat. Menurut Tajfel, identitas sosial seseorang ikut membentuk konsep diri dan memungkinkan orang tersebut menempatkan diri pada posisi tertentu dalam jaringan hubungan-hubungan sosial yang rumit (Sarwono, 2005: 91).

Dalam teori identitas sosial, identitas sosial seseorang sangat mempengaruhi persepsi diri individu, dan sebagai akibatnya individu menjadikan identitasnya sebagai sandaran utama dalam evaluasi diri. Kekuatan dan kelemahan diri umumnya ditentukan oleh status seseorang dalam kelompok acuannya, dan bagaimana menilai orang lain yang *out-group*. Ketika simbol-simbol keetnisan

membentuk perasaan yang sangat kuat dalam diri individu, maka prefensinya pada kelompok etnisnya menjadi sangat kuat. Bersamaan dengan hubungan individu yang bersangkutan dengan individu-individu lain di luar kelompok etnisnya yang menjadi anggota terganggu karena umumnya individu yang bersangkutan menolak penilaian individu dari kelompok etnis lain.

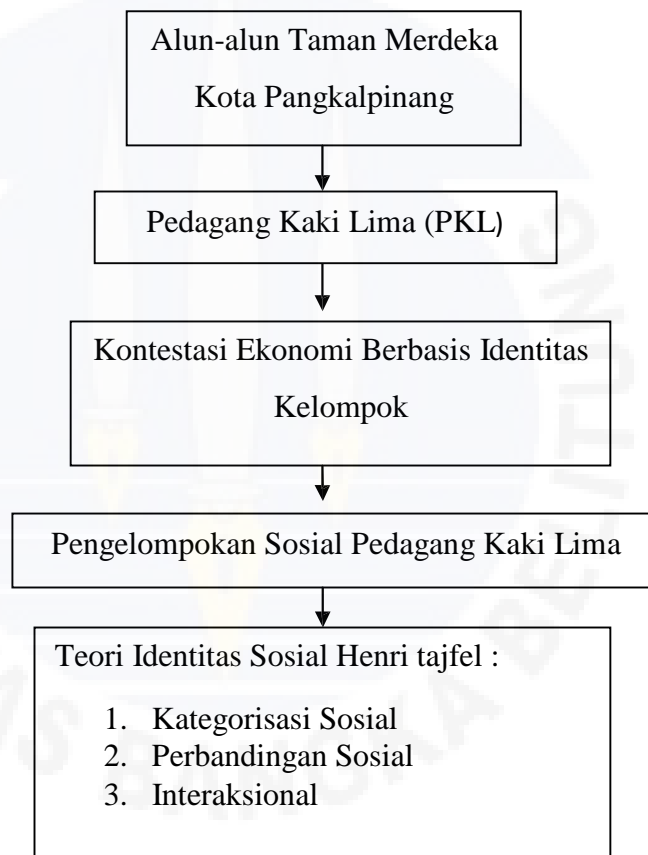
Selanjutnya bersama-sama dengan individu lain dari suatu kelompok, mereka membuat kriteria yang dapat digunakan untuk melawan dan menolak pendapat kelompok luar (*outgroup*) yang dominan. Pada tataran ini relasi antar individu dengan individu-individu dari kelompok etnis lain menjadi sangat renggang, bahkan mungkin timbul konflik. Relasi antar etnis yang dalam penelitian tersebut mangaju pada derajat keintiman yang ditujukan individu dari satu kelompok etnis untuk bergabung dengan kelompok etnis lain dalam aktivitas perdagangan (Arifin, 2016: 14).

Identitas sosial digunakan oleh seseorang untuk menentukan tindakan mereka sesuai dengan nilai yang berlaku dalam kelompok sosialnya (Tajfel dalam Arifin, 2016: 14). Teori ini akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis kontestasi ekonomi berbasis identitas kelompok pada pengelompokan sosial PKL di Alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang.

## **G. Kerangka Berpikir**

Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang merupakan salah satu ruang publik yang sering dikunjungi oleh masyarakat (lihat bagan 1.1). Masyarakat yang berkunjung biasanya sekedar untuk berekreasi atau

menghabiskan waktu luang. Perubahan taman ini beberapa kali terjadi, dimulai dari penataan atribut taman hingga icon taman itu sendiri. Taman ini juga sering dijadikan sebagai tempat diselenggarakan acara pemerintah maupun swasta. Pembangunan taman ini sedikitnya telah membawa perubahan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang. Taman ini juga merupakan taman pertama yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.



*Gambar 1.1 Bagan kerangka berpikir*

Letaknya yang strategis, mudah di jangkau bagi siapapun membuat masyarakat dari berbagai kalangan berbondong-bondong mendatangi taman tersebut. Hadirnya Alun-alun yang berada di pusat kota, juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan PKL yang selalu beriringan dengan pembangunan di

kota-kota besar maupun kecil. Pusat keramaian seolah-olah menjadi daya tarik tersendiri bagi para PKL dalam menjajakan barang dagangan mereka. Begitu juga realitas yang terjadi pada PKL di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang.

PKL di Alun-alun Taman merdeka terlihat cenderung mengelompok. Realitas yang terjadi dilapangan bahwa, adanya upaya saling mendominasi antar kelompok PKL. Tidak sembarang PKL yang bisa berjualan di wilayah tersebut. Ketika ada PKL baru yang ingin berjualan misalnya saja, mereka haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada salah satu PKL yang dianggap memiliki kekuasaan atas seluruh area lapak di Alun-alun.

Contohnya saja PKL asal Palembang lebih mendominasi jika dibandingkan dengan PKL asal daerah lainnya. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah PKL asal Palembang yang berjualan. Misalnya saja, makanan khas daerah “Pempek Palembang:” yang dijajakan oleh pedagang. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan teori identitas sosial dari Tajfel dalam menganalisis permasalahan penelitian ini. Teori identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada di dalam kelompok melalui mana dia secara sengaja menginternalisasikan nilai-nilai, turut berpartisipasi, serta mengembangkan rasa peduli dan kebanggaan terhadap kelompoknya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan gambaran dan rangkaian dari urutan penelitian yang berkenaan dengan apa yang akan dilakukan peneliti, mulai dari

tahap awal hingga tahap akhir yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Pada bab pertama akan dijelaskan beberapa tahap yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan uraian terkait permasalahan penelitian yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah merupakan uraian identifikasi masalah penelitian, tujuan penelitian terkait turunan dari rumusan masalah, manfaat penelitian berdasarkan topik penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, kemudian pada tinjauan pustaka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji, dan terakhir bagian kerangka teoritis yang digunakan sebagai alat analisis dalam menjawab rumusan atau permasalahan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori identitas sosial Henri Tajfel.

Selanjutnya pada bab kedua akan dikemukakan terkait metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara yang logis, sistematis, objektif untuk menemukan kebenaran secara keilmuan. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi yang peneliti gunakan yaitu Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang. Sementara itu, yang menjadi objek penelitiannya berupa aktivitas sosial-ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) serta objek yang dikaji berupa pengelompokan sosial PKL di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang. Sumber data dalam penelitian ini juga berupa data primer berupa wawancara, observasi dan data sekunder berupa Perda Kota Pangkalpinang, media, jurnal dan penelitian terdahulu yang masih berkorelasi dengan fokus penelitian yang sedang peneliti kaji. Teknik



pengumpulan data akan dilakukan dengan observasi partisipasi, wawancara secara mendalam, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kemudian pada bab ketiga berupa gambaran umum mengenai deskripsi terkait lokasi atau objek penelitian. Deskripsi atau gambaran umum pada penelitian ini membahas terkait lokasi geografis Kota Pangkalpinang, Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang, definisi PKL, PKL di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang serta daftar penerimaan bantuan tenda dari Kementerian Perdagangan tahun 2017 kepada para PKL di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang.

Setelah gambaran umum, dilanjutkan pada bab keempat yaitu hasil dan pembahasan. Bagian ini membahas terkait temuan-temuan dilapangan, kemudian di analisis dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian pertama, akan di uraikan mengenai bentuk-bentuk kontestasi ekonomi berbasis identitas yang terjadi antar Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang. Bagian berikutnya juga akan dibahas terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi pengelompokan sosial para PKL di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang, dan yang terakhir akan di analisis menggunakan teori identitas sosial Henri Tajfel.

Pada bagian terakhir yaitu bab kelima berupa penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Sedangkan saran berupa rekomendasi solusi-solusi yang

ditawarkan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Selain itu juga terdapat implikasi teori yang merupakan jawaban dari hasil penelitian yang berkorelasi dengan teori yang digunakan berupa teori identitas sosial Henri Tajfel.

